

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama dua minggu secara daring yang dimulai pada tanggal 7 hingga 18 Juni 2021 dan selama tiga minggu secara luring di Apotek Pro–Tha Farma yang dimulai pada tanggal 21 Juni sampai dengan 9 Juli 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. PKPA di Apotek Pro-tha Farma dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. PKPA dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi calon Apoteker mengenai pengolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, pelaporan, pencatatan, serta pemusnahan obat) serta manajemen persediaan, administrasi, sumber daya manusia serta pelayanan kefarmasian.
3. Calon Apoteker melalui PKPA memperoleh kesempatan langsung untuk melihat, mempelajari serta mempraktikkan secara langsung ilmu yang sudah didapat diperkuliahan, untuk mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek (pelayanan resep/non resep, KIE).
4. Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah diberikan (Komunikasi dengan pasien, komunikasi, dengan tenaga kesehatan lain maupun komunikasi dengan teman sejawat Apoteker).

5. PKPA dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

5.1 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Protha Farma adalah sebagai berikut :

1. Calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu mengenai obat-obatan, pelayanan, perundang-undangan, dan sistem manajemen sebelum pelaksanaan PKPA.
2. Calon Apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek Pro-Tha Farma dan melakukan sesuai dengan SOP sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
3. Pemberian KIE ke pasien calon Apoteker diharapkan meningkatkan kemampuannya berkomunikasi secara baik dan benar supaya apa yang disampaikan kepada pasien benar-benar paham dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2020, *MIMS Petunjuk Konsultasi Indonesia Edisi 20*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2009, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.